

Gubernur Banten Resmikan Masjid Rahmatan Lil'Alamin Kab. Lebak

LEBAK (IM)- Gubernur Wahidin Halim (WH), meresmikan Masjid Rahmatan Lil'Alamin di kawasan wisata Negeri Di Atas Awan, Gunung Luhur, Citorek Kidul, Kabupaten Lebak, Senin (28/3). Dana pembangunan masjid berkapasitas 200 orang itu berasal dari swadaya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Banten.

“Tempat ini punya potensi luar biasa. Sejuk dan indah sekali. Allah itu indah dan menciptakan keindahan. Citorek itu punya potensi luar biasa. Jalan dan jembatan kita bangun dan jaga, kalau ada yang rusak kita perbaiki,” ujarnya.

Dikatakan, Masjid Rahmatan Lil'Alamin yang berarti rahmat untuk sekalian alam dibangun untuk memfasilitasi wisatawan yang berkunjung ke Negeri Di Atas Awan untuk tafakur atas ciptaan Allah SWT.

“Jadi ada pesan-pesan mengagumi ciptaan Allah SWT. Kita harus menjaga lingkungan ini. Agama kita memerintahkan untuk tidak

menebang pohon sembarangan, juga jangan mengeksploitasi,” tambahnya, dalam siaran pers.

Masih menurut Gubernur WH, pembangunan Masjid Rahmatan Lil'Alamin yang mahal adalah pembangunan pondasinya karena berada di sisi tebing.

Dalam laporannya, Ketua Pembangunan Masjid Rahmatan Lil'Alamin Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Septo Kalnadi perencanaan pembangunan dilakukan pada 1 September 2019. Peletakan batu pertama pada 24 Oktober 2019.

“Pembangunan konstruksi oleh PT Amanah Mandiri Makmur dengan biaya sekitar Rp 5,5 miliar. Dana yang terhimpun dari para ASN mencapai Rp 6,521 miliar,” pungkasnya.

Sebagai informasi desain bangunan Masjid Rahmatan Lil'Alamin berusaha menyatu dengan bangunan rumah panggung khas di wilayah Citorek. Atap menggunakan model limas dengan pilihan limas besar dipadukan dengan limas kecil. ● pp



IDN/ANTARA

MEMBERSIHKAN MASJID JELANG RAMADHAN

Sejumlah anggota Badan Pengurus Cabang (BPC) Indonesian Housekeepers Association (IHKA) Bogor Raya membersihkan Masjid Raya Al-Amaliyah, Ciawi, Kab. Bogor, Jawa Barat, Senin (28/3). Kegiatan membersihkan masjid tersebut selain sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus untuk memberikan rasa nyaman beribadah bagi jamaah dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1443 H.

Pemkab Tangerang Lanjutkan Program Pembangunan Sanitren

Pemkab Tangerang berkewajiban memberikan fasilitas kepada pondok pesantren sebagai sarana pendidikan Islam sekaligus lembaga pencetak alim ulama dan kiai. Hal ini bertujuan menjadikan masyarakat Kabupaten Tangerang agar lebih agamis.

TANGERANG (IM)- Sempat terhenti akibat covid-19, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar berkomitmen melanjutkan program sanitasi berbasis pesantren (sanitren). Setidaknya sebelum 2023, akan terbangun sanitren di 600 pondok pesantren (ponpes) di wilayah Kabupaten Tangerang. Program lanjutan Sanitren tahun ini ditandai dengan peresmian Sanitren Ponpes Asma'ul Husna di Desa Tapos, Kecamatan Tigaraksa.

Tercatat hingga saat ini, sanitren sudah terbangun di 346 ponpes. “Jadi 2022 dan akhir 2021, kami sudah mulai lagi menuntaskan program sanitasi berbasis pondok pesantren. Hal ini untuk menuntaskan visi-misi kita yakni Kabupaten Tangerang religius,” ujar Zaki dalam keterangan resminya, Senin (28/3).

Zaki menegaskan bahwa Pemkab Tangerang berkewajiban memberikan fasilitas kepada pondok pesantren sebagai sarana pendidikan Islam sekaligus lembaga pencetak

alim ulama dan kiai. Hal ini bertujuan menjadikan masyarakat Kabupaten Tangerang agar lebih agamis.

Sebagaimana diketahui, Sanitren merupakan bagian dari program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah dimulai sejak 2018. Program ini menjadi salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang untuk menuntaskan persoalan sanitasi pada pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tangerang.

Untuk program Sanitren tahun ini, Pemkab Tangerang mengalokasikan dana sebesar Rp20 miliar bagi 150 ponpes dengan alokasi masing-masing ponpes sebesar Rp130 juta. Untuk penyalurannya pemkab bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

Pelaksanaan program ini akan dilakukan pendampingan secara intensif kepada ponpes yang akan menerima bantuan

Sanitren. Pasalnya, mekanisme administrasi dan pelaporan bagi ponpes masih menjadi hambatan, mengingat masih banyak yang belum memahami tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban program.

Program Sanitren memang difokuskan pada pembangunan sarana sanitasi berupa layanan air bersih untuk mandi, cuci, dan WC di lingkungan pesantren. Harapannya, setiap pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Tangerang juga mengedepankan dan memperhatikan pembangunan sanitasi di setiap pondok pesantrennya agar lebih bersih, sehat, rapi, dan nyaman.

Di sisi lain, program unggulan religius yang sudah dijalankan pemerintah daerah bukan hanya meningkatkan pemahaman dari sisi keagamaan. Namun ini juga sekaligus membentuk dan meningkatkan kualitas hidup dalam sisi kesehatan para santri, guru, ulama, dan ustaz.

Dengan begitu, persepsi bahwa bahwa pondok pesantren itu terbelakang, kumuh, dan tidak tertata bisa hilang sama sekali. “Program unggulan ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah daerah untuk memberikan bantuan pembangunan sanitasi untuk pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Dari sekitar 800 pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah baru bisa memberikan bantuan program Sanitren kepada total 346 pondok pesantren hingga akhir 2021. Secara detail, program Sanitren pada 2018 dimulai sebanyak 46 ponpes, 2019 sebanyak 150 ponpes, 2020 tidak diberikan karena covid-19, serta 2021 sebanyak 150 ponpes. “Sisanya akan kami tuntaskan hingga sebelum 2023 agar semua pondok pesantren mendapatkan sanitasi yang layak,” pungkash Bupati Zaki. ● pp

Jembatan Cisadane Penghubung Cisauk-Serpong Tangsel Rusak Parah

TANGERANG (IM)- Warga dan pengguna jalan mengkhawatirkan jembatan penghubung antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan rusak parah. Jembatan yang berlokasi di Desa Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, ini sudah tidak layak pakai.

Kerusakan pada jembatan yang dibangun pada 1982 itu terjadi di seluruh badan jembatan, mulai dari jalan yang berlubang, sampai tiang besi penyangga patah dan terlepas. Pengguna jalan dan warga setempat pun mengeluhkan kondisi jembatan yang sudah terbelang tua itu. Seperti halnya Arif, seorang pengguna jalan yang setiap hari melewati jembatan tersebut.

Arif mengatakan, jembatan ini akses terdekat untuk menuju tempat dia bekerja. “Saya merasa risih dan takut setiap melewati jembatan ini,

karena kita tidak tahu kapan musibah datang. Takutnya pas saya lewat jembatan ini roboh,” ucap Arif, Senin (28/3).

Arif berharap pemerintah segera bertindak untuk memperbaiki jembatan ini agar para pengguna jalan merasa nyaman dan aman ketika melintasinya.

Begitu juga dengan warga setempat, Tarmin, yang mengaku khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada jembatan di daerahnya itu.

La menerangkan bahwa selain usia jembatan sudah tua, jembatan tersebut juga banyak sekali mengalami kerusakan.

“Semoga pemerintah bisa cepat mengganti jembatan ini, masa harus nunggu ada korban jiwa karena jembatan roboh baru bertindak,” ujar Tarmin.

“Itu jalannya ditambal pak-ai pelat besi karena bolong dan banyak tiang besi patah, bahaya banget untuk pengguna jalan,” tambah dia. ● pp

Soal Eksekusi Rumah, Kapolres Tangsel Diadukan ke Propam

TANGSEL (IM)- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tangerang Selatan, AKBP Sarly Solly diadukan ke Propam Mabes Polri karena dinilai melanggar kode etik profesi Polri.

Pelanggaran kode etik tersebut terkait soal menghentikan eksekusi rumah warga. Sarly diadukan oleh pengacara pemohon, Swardi Arintonan. “Kami telah mengadakan dugaan pelanggaran kode etik ke Divisi Propam Mabes Polri sebagai pihak yang berwenang menyelidiki, memeriksa dan memutuskan suatu dugaan pelanggaran kode etik di kepolisian,” kata Swardi seperti dilansir dari Detik, Senin (28/3).

Swardi menyebutkan laporan berdasar penghentian proses eksekusi perdata yang sedang berlangsung pada 9 Maret 2022 yang dilaksanakan Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. “Pelaporan ini kami lakukan pada 18 Maret 2022,” ujar Swardi.

Penghentian eksekusi tersebut, kata Swardi, berakibat kliennya saat ini belum dapat obyek tersebut sekaligus melaksanakannya eksekusi. Menurutnya, proses hukum eksekusi ini sia-sia kalau rumah yang telah

dibeli dari kantor lelang negara ini belum bisa dimiliki.

Ia menyalkan tindakan Sarly menghentikan proses eksekusi. Hal ini berakibat proses penyerahan rumah obyek eksekusi tertunda hingga saat ini dan belum tahu pastinya kapan.

Swardi menjelaskan bahwa saat ini PN Tangerang telah menyatakan eksekusi selesai karena secara hukum penetapan eksekusi telah dibacakan. Namun, faktanya sampai saat ini, obyek eksekusi secara riil belum diterima oleh kliennya padahal sudah lebih waktu seminggu diberikan kesempatan kepada termohon tinggal sebagaimana yang diminta kapolres, sehingga belum ada kepastian hukum atas hak kliennya.

Keputusan menghentikan eksekusi itu, menurut Swardi, bertentangan dengan prosedur hukum dan ketentuan perundangan-undangan. Sebab, penghentian eksekusi seharusnya ditetapkan oleh pengadilan.

Ia menilai penghentian eksekusi oleh Sarly dengan pertimbangan kemanusiaan dan hati nurani adalah tidak tepat. Menurut Swardi, secara

hukum eksekusi merupakan upaya paksa dan yang berwenang melakukan pertimbangan-pertimbangan demikian hanya ketua pengadilan.

Sedangkan dalam hal ini, lanjut Swardi, diwakili juru sita melakukan pengosongan sehingga menimbulkan polemik hukum di masyarakat hingga viral di media sosial mempertanyakan eksekusi dan tidak menunjukkan wibawa hukum.

“Seharusnya yang dilakukan kapolres adalah upaya pengamanan dan penegakan hukum sehingga proses eksekusi berjalan dengan baik,” tutur Swardi.

Merespons pengaduan ke Propam tersebut, Sarly memersilakan sesuai mekanisme yang ada. “Silakan saja yang bersangkutan melaporkan memang seperti itu mekanismenya,” ucap Sarly, Senin (28/3).

Sarly mengatakan, nanti Propam akan melakukan penyelidikan dan dirinya siap bertanggung jawab. “Nanti dari Propam akan melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Harus siap karena itu tanggung jawab saya,” ujar Sarly. ● pp

WH Persilakan Warga Banten Sudah 2 Kali Vaksin Covid Mudik Lokal

LEBAK (IM)- Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), mempersilakan warga yang sudah dua kali disuntik dua dosis vaksin Corona atau Covid-19 untuk mudik lokal. Dia menilai warga yang sudah dua kali disuntik vaksin aman untuk mudik lokal.

“Boleh, kalau sementara antardaeerah, dua kali (vaksinasi) aman,” kata Wahidin Halim usai meresmikan Jembatan Ciberang di Lebak, Senin (28/3).

Capaian vaksinasi untuk dosis pertama dan kedua saat ini sudah 94 persen dan booster 62 persen. Dia minta warga tetap menerapkan prokes menggunakan masker saat berinteraksi di luar.

“Jangan sampai ada saudara kita sakit, nggak pakai masker dan terkena, pemerintah berupaya karena konsep agama kita kalau ada musibah ikhtiar, yaitu pakai masker,” ujarnya.

Dia mengatakan vaksinasi Corona terus diupayakan hingga booster mencapai angka maksimal di Banten. Dia menyebut vaksinasi merupakan upaya melindungi warga.

“Semua ikhtiar menyelamatkan warga, hadir dan saya hadir dalam rangka pemimpin menyelamatkan warga,” jelasnya.

Wahidin menyebut penanganan Covid-19 di Banten selalu urutan 10 besar. Dia menyebut hal itu merupakan kerja keras semua pihak. ● pp



IDN/ANTARA

STOK GAS ELPIJI JELANG RAMADHAN DI PEKALONGAN

Tim pengawas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan, melakukan pengecekan ketersediaan gas elpiji di salah satu agen gas di Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (28/3). Pengecekan tersebut untuk memastikan stok gas elpiji aman jelang ramadhan hingga lebaran.

JIKA TOL SERPAN SELESAI

Ketua DPRD Optimistis Zona Industri Pandeglang Dilirik Investor

PANDEGLANG (IM)- Lima kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan masuk dalam zona (daerah) industri berskala besar belum dilirik oleh investor. Tapi, Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi optimistis investor bakal berdatangan jika Jalan Tol Serang – Panimbang (Serpan) selesai dibangun.

Kelima kecamatan yang sudah ditetapkan masuk zona industri oleh Pemkab Pandeglang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu, Kecamatan Cikeusik, Cibitung, Sukaresmi, Pagelaran, dan Kecamatan Bojong.

Tubagus Udi Juhdi mengatakan, berdasarkan Perda RTRW terbaru sebanyak 5 kecamatan sudah diputuskan masuk dalam zona industri.

“Zona industri sudah ditetapkan namun belum ada investor yang tertarik berinvestasi. Sementara ini investornya masih maju mundur,” katanya, kemarin.

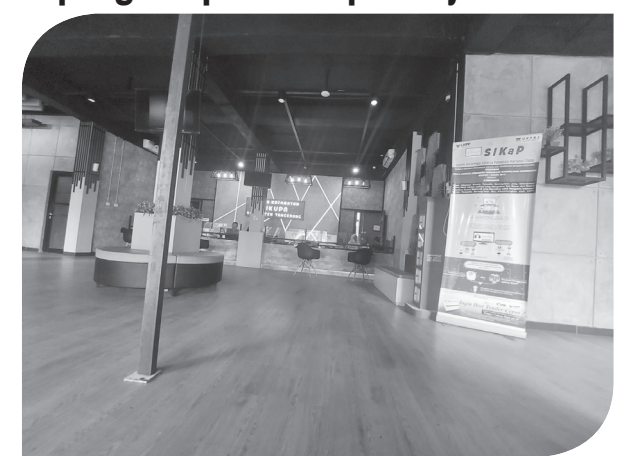
Investor yang datang saat ini masih berupa penajak. Belum secara serius melangkah untuk berinvestasi. “Penyebab maju mundurnya

investor ini disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19. Serta kondisi Kabupaten Pandeglang masuk dalam wilayah rawan bencana,” katanya.

Belum lama ini, investor ada yang datang berniat mau berinvestasi di wilayah zona industri. Mereka tertarik untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Pandeglang. “Namun kemarin itu ada kejadian bencana alam gempa bumi dan banjir bandang. Sehingga membuat mereka masih pikir-pikir untuk melakukan investasi,” katanya.

Lebih lanjut Juhdi mengaku, optimis ke depan akan banyak investor datang berinvestasi di Kabupaten Pandeglang. “Tinggal kita harus sering melakukan ekspose untuk menarik investor agar mau berinvestasi di zona industri Kabupaten Pandeglang. Bahwa investasi di Kabupaten Pandeglang sangatlah aman dan banyak destinasi wisatanya yang cantik dan alami,” katanya. ● pra

Anggaran Rp154 Juta untuk Penataan Lapangan Upacara Dipertanyakan



IST

Renovasi plafon Kantor Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

TANGERANG (IM)- Tema semi industrial yang diangkat dalam renovasi pembangunan plafon di kantor kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, seharga Rp160 juta untuk luasan 128 m2 dinilai terlampaui tinggi.

Karena itu, aktifis sekaligus penggiat sosial Hilman Santosa kepada wartawan mengungkap prihatin atas tingginya anggaran yang dipersiapkan untuk renovasi plafon tersebut.

“Tema Industrial seharusnya lebih murah dibandingkan dengan tema - tema yang umum digunakan di setiap kantor - kantor publik, karena bahan material yang digunakan lebih simple,” ungkap Hilman.

Di samping renovasi plafon yang menjadi perhatian, dirinya juga menyoroti tingginya anggaran yang digunakan kecamatan Cikupa untuk penataan lapangan upacara yang menelan anggaran hingga Rp154 juta lebih.

“Ini ada indikasi dugaan mark-up kalau begini, karena berdasarkan pantauan kami di lokasi, penataan itu disinyalir dikerjakan secara serampangan,” jelas Hilman.

Hal tersebut menurut

dia cukup beralasan lantaran berdasarkan pantauannya di lokasi, pengerjaan penataan lapangan upacara hanya sebatas dilapisi rumput sintetis.

“Tutupun tidak semua, saya belum mengetahui apakah keseluruhan itu ditutupun dengan rumput sintetis atau cuma sebagian saja,” ujarnya.

Ia berujar, indikasi dugaan kecurangan di dua kegiatan tersebut tidak menutup kemungkinan terdapat dugaan kecurangan-kecurangan pada kegiatan lainnya. “Camat harusnya punya malu dong, dari 222 kegiatan, kami menemukan indikasi dugaan Mark-Up pada dua kegiatan yang setiap hari camat dan jajarannya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, masa iya depan mata ngga tahu, apa pura-pura tidak tahu,” ucapnya.

Sayangnya hingga berita ini dilansir, camat Cikupa H.Abdullah.S.Sos.M.Si, belum dapat dimintai keterangannya.

Beberapa kali wartawan mencoba menghubungi via pesan singkatnya yang bersangkutan enggan merespon.

Begitupun saat wartawan mencoba memenuinya, namun dirinya tengah ada kegiatan di luar kantornya. ● joh